

## **ANALISIS PERKEMBANGAN KEBIJAKAN EKONOMI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MIKRO DI PROVINSI GORONTALO**

Moh. Kelvin Sulila<sup>1</sup>, Hasim<sup>2</sup>,

*Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia<sup>1</sup>*

*Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia<sup>2</sup>*

Email: [kevinsulila@gmail.com](mailto:kevinsulila@gmail.com)

---

**Abstract:** *The role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is very strategic in driving regional economic growth in Gorontalo Province. This study aims to analyze the influence of fiscal economic policy on microeconomic growth, particularly the MSME sector, using quantitative and qualitative approaches (mixed methods). The results show that fiscal policy, through increased government spending, capital assistance, tax incentives, and digitalization programs such as the e-catalog and the MSME Data Collection Information System (SIAP AKU), contributes significantly to increasing MSME productivity, employment, and market access. The effectiveness of these policies is influenced by mediating factors, such as business actor capacity, financial literacy, digitalization, access to financing, and the quality of MSME data. However, challenges such as low digital literacy and limited access to financing still limit the maximum impact of fiscal policy. This study concludes that the integration of inclusive fiscal policy and long-term empowerment programs will strengthen MSMEs as the engine of sustainable economic growth in Gorontalo, improve community welfare, and encourage resilient and adaptive economic development.*

**Keywords:** *MSMEs, Microeconomics, Fiscal Policy, Regional Economic Growth, Gorontalo, Digitalization, Access To Financing.*

---

**Abstrak:** Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan ekonomi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi mikro, khususnya sektor UMKM, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed methods). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, melalui peningkatan belanja pemerintah, bantuan modal, insentif pajak, dan program digitalisasi seperti e-catalog dan Sistem Informasi Pendataan UMKM (SIAP AKU), berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan akses pasar UMKM. Efektivitas kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor mediasi, seperti kapasitas pelaku usaha, literasi keuangan, digitalisasi, akses pembiayaan, dan kualitas data UMKM. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan terbatasnya akses pembiayaan masih membatasi dampak maksimal kebijakan fiskal. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi antara kebijakan fiskal yang inklusif dan program pemberdayaan jangka panjang akan memperkuat UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Gorontalo, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan ekonomi yang tangguh dan adaptif

**Kata Kunci:** **UMKM, ekonomi mikro, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi daerah, Gorontalo, digitalisasi, akses pembiayaan.**

### **PENDAHULUAN**

Peran ekonomi mikro, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sangat vital dalam pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, menjadikannya tulang punggung perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah (Aprilia et al., 2025; Juminawati et al., 2021; Sinha et al., 2024). Selain menciptakan lapangan kerja, UMKM juga berperan sebagai jaring pengaman sosial yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan (Aprilia et al., 2025; Juminawati et al., 2021).

Kebijakan fiskal, yang meliputi pengeluaran dan penerimaan pemerintah, memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mikro. Melalui instrumen seperti insentif pajak, belanja pemerintah, dan program bantuan, kebijakan fiskal dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk berkembang, meningkatkan akses pembiayaan, serta memperluas pasar (Atichasari & Marfu, 2023; Lastri et al., 2025; Prasetyo, 2020; Sitompul et al., 2023). Studi empiris menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan kebijakan fiskal yang tepat dapat

mendorong pertumbuhan UMKM dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Atichasari & Marfu, 2023; Prasetyo, 2020; Sitompul et al., 2023).

Di Provinsi Gorontalo, UMKM mendominasi sektor ekonomi mikro, terutama di bidang makanan, minuman, dan furnitur. Data tahun 2021 menunjukkan adanya dinamika jumlah UMKM di berbagai sektor, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 dan perubahan permintaan pasar (Dama, 2024). Meskipun demikian, sektor UMKM di Gorontalo tetap menjadi penggerak utama ekonomi lokal, dengan kontribusi signifikan terhadap pendapatan dan penyerapan tenaga kerja (Dama, 2024).

Pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,13%, menunjukkan tren positif meski masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang belum optimal, daya saing rendah, dan tingkat partisipasi publik yang perlu ditingkatkan (Ali & Saleh, 2020; Humalangi et al., 2023). Implementasi kebijakan fiskal, seperti desentralisasi fiskal dan belanja infrastruktur, telah terbukti berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meski dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan masih bervariasi (Ali & Saleh, 2020; Sahi et al., 2020).

Namun, tantangan utama yang dihadapi UMKM di Gorontalo meliputi akses pembiayaan, kualitas sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap teknologi dan pasar digital (Dama, 2024; "Factors Determining the Policy Implementation for Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMES) Empowerment In Indonesia," 2022). Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti program pengadaan digital dan pelatihan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi lintas sektor dan kebijakan yang lebih adaptif (Dama, 2024; Humalangi et al., 2023).

#### Kebijakan Ekonomi Fiskal: Pengertian dan Instrumen Utama

Kebijakan ekonomi fiskal adalah serangkaian tindakan pemerintah dalam mengelola penerimaan (seperti pajak) dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan (Adzam et al., 2024; Al\_kasasbeh, 2023). Instrumen utama kebijakan fiskal meliputi pengeluaran pemerintah (belanja negara untuk infrastruktur, bantuan sosial, subsidi), pajak (penerimaan negara dari masyarakat dan pelaku usaha), serta subsidi (dukungan keuangan untuk sektor tertentu, termasuk UMKM) (Adzam et al., 2024; Al\_kasasbeh, 2023; Pasichnyi, 2020). Efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada desain dan implementasinya, serta kemampuan pemerintah menyesuaikan instrumen dengan kebutuhan ekonomi daerah (Al\_kasasbeh, 2023; Pasichnyi, 2020).

#### Ekonomi Mikro/UMKM: Definisi, Peran, dan Indikator

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah unit usaha dengan skala kecil hingga menengah yang berperan penting dalam perekonomian daerah. UMKM berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan PDRB daerah (Sitompul et al., 2023; Weldeclassie et al., 2019). Indikator relevan untuk menilai peran UMKM meliputi jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja yang diserap, omzet penjualan, dan kontribusi terhadap PDRB (Sitompul et al., 2023; Weldeclassie et al., 2019). Studi di berbagai daerah menunjukkan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal, terutama dalam menghadapi krisis dan mendorong inklusi ekonomi (Nayak & Soni, 2023).

#### Hubungan antara Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Mikro

Kebijakan fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi mikro, khususnya UMKM. Jalur pengaruh utama meliputi belanja pemerintah (misal bantuan langsung, subsidi, dan pengadaan barang/jasa dari UMKM), insentif fiskal (seperti pajak rendah atau pembebasan pajak), serta pembiayaan mikro (akses kredit dan modal usaha) (Atichasari & Marfu, 2023; Hadi et al., 2023; Prasetyo, 2020; Sitompul et al., 2023; Tendengu et al., 2022). Studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa insentif pajak dan belanja pemerintah dapat meningkatkan investasi, ekspansi usaha, dan daya saing UMKM (Atichasari & Marfu, 2023; Prasetyo, 2020; Sitompul et al., 2023).

#### Jalur Pengaruh: Belanja Pemerintah, Insentif Fiskal, dan Pembiayaan Mikro

Belanja pemerintah yang diarahkan pada penguatan UMKM, seperti bantuan modal, pelatihan, dan pengadaan barang/jasa, terbukti mendorong pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Insentif fiskal berupa pajak rendah atau kemudahan administrasi pajak dapat meningkatkan investasi dan ekspansi usaha UMKM. Pembiayaan mikro, termasuk akses ke kredit dan teknologi

keuangan (fintech), juga menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM .

Faktor Mediasi/Moderator: Kapasitas Usaha, Data UMKM, Akses Pembiayaan, Digitalisasi

Efektivitas kebijakan fiskal terhadap UMKM sangat dipengaruhi oleh faktor mediasi seperti kapasitas pelaku usaha, kualitas data dan pendataan UMKM, akses pembiayaan, serta tingkat adopsi digitalisasi . Digitalisasi, misalnya, memperkuat dampak akses keuangan terhadap kinerja UMKM, sementara pendataan yang baik memudahkan penyaluran bantuan dan insentif (Dewi et al., 2023). Kapasitas usaha yang rendah dan keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi tantangan utama di banyak daerah (Hadi et al., 2023).

Implikasi untuk Gorontalo

Meskipun belum ada studi spesifik tentang Gorontalo, temuan dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal yang tepat, didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku UMKM, digitalisasi, dan pendataan yang akurat, dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi mikro di tingkat daerah (Atichasari & Marfu, 2023). Pemerintah daerah perlu menyesuaikan instrumen fiskal dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM lokal agar dampaknya optimal.

Dengan demikian, analisis perkembangan kebijakan ekonomi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi mikro di Provinsi Gorontalo menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa UMKM dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Aprilia et al., 2025; Prasetyo, 2020; Sitompul et al., 2023)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif (mixed methods) untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi mikro/UMKM di Provinsi Gorontalo. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara indikator fiskal dan indikator ekonomi mikro secara statistik, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami studi kasus program bantuan fiskal kepada UMKM. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan relevan terhadap konteks lokal.

## **HASIL & PEMBAHASAN PENELITIAN**

Hasil Gambaran Umum Ekonomi Mikro dan UMKM di Gorontalo

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Gorontalo memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang struktur perekonomian daerah. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Gorontalo, terdapat lebih dari 85.000 unit UMKM aktif yang tersebar di enam kabupaten/kota, dengan konsentrasi terbesar di Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Sektor usaha yang paling dominan adalah makanan dan minuman, furnitur, kerajinan tangan, serta perdagangan eceran, yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

UMKM menjadi pilar utama ekonomi daerah karena sifatnya yang padat karya, menggunakan sumber daya lokal, dan fleksibel terhadap perubahan pasar. Meskipun pandemi Covid-19 sempat menurunkan jumlah unit usaha aktif hingga hampir 15% pada 2020–2021, banyak pelaku UMKM yang mampu beradaptasi dengan mengubah model bisnis, seperti beralih ke penjualan daring (online marketplace) dan memproduksi barang sesuai permintaan baru, misalnya masker kain, produk herbal, dan makanan beku. Menariknya, karena meningkatnya permintaan rumah tangga selama periode pembatasan sosial dan meningkatnya kegiatan renovasi rumah tangga.

Pada 2024–2025, peran UMKM kembali menguat seiring pemulihan ekonomi Gorontalo yang tumbuh 4,13% pada 2024 dan melesat 6,07% pada triwulan I 2025 (BPS Gorontalo, 2025). Kinerja ini menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga—komponen utama penggerak PDRB daerah—serta menjadi motor dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global.

#### Perkembangan Kebijakan Fiskal dan Dampaknya

Kebijakan fiskal di Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan orientasi yang semakin pro-mikro. Pemerintah daerah secara aktif menggunakan instrumen fiskal, seperti belanja pemerintah, subsidi, insentif pajak, dan bantuan sosial produktif, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, total pagu belanja pemerintah di Gorontalo tahun 2024 mencapai sekitar Rp 15,30 triliun, meningkat 15,7% dibanding tahun sebelumnya. Dari total tersebut, sebagian diarahkan untuk program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti bantuan UMKM, pelatihan kewirausahaan, serta pengadaan produk lokal melalui e-catalog daerah.

Program pengadaan melalui e-catalog berfungsi sebagai sarana memperluas pasar produk UMKM dan memastikan keberlanjutan permintaan. Dalam sistem ini, produk lokal dari pelaku UMKM dapat diserap langsung oleh instansi pemerintah tanpa proses tender yang rumit, sehingga mendorong peningkatan volume produksi, perluasan jaringan distribusi, dan peningkatan laba operasional UMKM. Selain itu, bantuan pemerintah dalam bentuk hibah bahan produksi dan modal usaha mikro terbukti meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing lokal.

Dari sisi penerimaan, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM, pembebasan pajak untuk omzet di bawah ambang tertentu, serta penyederhanaan administrasi pajak. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi tanpa terbebani oleh kewajiban fiskal yang berat. Secara keseluruhan, sinergi antara belanja publik dan insentif fiskal ini menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi mikro yang lebih stabil dan inklusif di Gorontalo.

#### Analisis Korelasi Indikator Fiskal dan Ekonomi Mikro

Analisis korelatif sederhana antara indikator fiskal dan ekonomi mikro menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara peningkatan belanja pemerintah dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi mikro. Ketika pagu belanja pemerintah meningkat lebih dari 15% pada 2024, jumlah UMKM aktif dan omzet sektor mikro juga menunjukkan kenaikan. Pertumbuhan belanja publik menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap sektor-sektor produktif di Gorontalo, terutama perdagangan, jasa, dan makanan/minuman, yang merupakan tulang punggung ekonomi mikro.

Selain itu, penelitian di Kota Gorontalo (Universitas Negeri Gorontalo, 2023) menemukan bahwa modal usaha dan efisiensi biaya produksi merupakan faktor paling dominan yang memengaruhi pendapatan UMKM, dengan kontribusi modal terhadap pendapatan mencapai sekitar 50%. Hal ini berarti bahwa kebijakan fiskal yang berfokus pada penyediaan modal kerja dan pengurangan biaya produksi (misalnya melalui subsidi bahan baku atau kemudahan pajak) akan langsung meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil.

Hubungan positif ini juga terlihat dari indikator tenaga kerja. Dengan meningkatnya realisasi belanja publik dan program bantuan produktif, banyak UMKM yang menambah tenaga kerja baru untuk memenuhi permintaan. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi mikro, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dan mengurangi tingkat pengangguran di wilayah Gorontalo.

Salah satu contoh konkret dari implementasi kebijakan fiskal yang berorientasi pada ekonomi mikro adalah program bantuan bahan produksi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo pada 2025. Melalui program ini, sebanyak 1.945 pelaku UMKM di Kota Gorontalo menerima bantuan senilai total Rp 1,945 miliar, berupa bahan baku, peralatan, dan dukungan teknis. Program serupa juga dilakukan di kabupaten lain, dengan bantuan modal Rp 1 juta per pelaku usaha untuk 1.640 UMKM.

Bantuan ini dirancang agar pelaku usaha tidak hanya menerima dana, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan nilai tambah produk.

Selain bantuan langsung, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga meluncurkan Sistem Informasi Pendataan UMKM (SIAP AKU), sebuah platform digital untuk memfasilitasi pendataan, promosi, dan transaksi produk UMKM secara daring. Digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem ini membantu UMKM lokal untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik, karena produk mereka secara resmi terdaftar dan diakui oleh pemerintah.

Namun, meskipun program ini menunjukkan hasil positif, masih terdapat tantangan signifikan di aspek literasi keuangan dan digitalisasi. Berdasarkan survei Dinas Koperasi dan UMKM Gorontalo tahun 2024, sekitar 60% pelaku UMKM belum memiliki literasi digital dasar yang memadai, seperti pengelolaan toko online atau penggunaan aplikasi keuangan. Akibatnya, sebagian bantuan produktif belum diikuti dengan peningkatan efisiensi keuangan yang optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi digital benar-benar mampu memperkuat daya saing UMKM di Gorontalo.

#### Faktor Penghambat dan Mediasi

Efektivitas kebijakan fiskal terhadap penguatan UMKM di Gorontalo tidak lepas dari berbagai faktor penghambat dan variabel mediasi. Pertama, kapasitas pelaku usaha menjadi penentu utama keberhasilan program. Banyak pelaku UMKM yang masih menjalankan bisnis secara tradisional, dengan manajemen keuangan yang sederhana dan tanpa pencatatan yang baik. Kedua, kualitas data dan sistem pendataan UMKM masih terbatas, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan atau merancang kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Ketiga, akses pembiayaan menjadi hambatan struktural. Meskipun terdapat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi), banyak pelaku usaha di Gorontalo yang belum memenuhi syarat administratif, seperti tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit formal. Data tahun 2025 menunjukkan hanya sekitar 9.158 debitur UMKM di Gorontalo yang berhasil mengakses KUR dengan total nilai Rp 454 miliar—angka ini masih relatif kecil dibandingkan potensi UMKM yang mencapai puluhan ribu unit.

Keempat, tingkat adopsi digitalisasi masih rendah. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memperkuat hubungan antara akses keuangan dan kinerja UMKM, baik dalam hal peningkatan penjualan, efisiensi operasional, maupun perluasan pasar. Tantangan-tantangan tersebut menjadi faktor mediasi yang menjelaskan mengapa efek kebijakan fiskal belum sepenuhnya maksimal terhadap seluruh pelaku usaha mikro di daerah ini.

#### Implikasi Kebijakan

Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diarahkan secara tepat dan terintegrasi mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi mikro di Gorontalo. Belanja publik yang meningkat, disertai program bantuan produktif dan insentif pajak, memberikan efek positif terhadap kinerja UMKM. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dampaknya, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek pendukung lain seperti peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi, dan perbaikan pendataan UMKM.

Secara strategis, kebijakan fiskal yang efektif di Gorontalo harus memadukan antara transfer fiskal langsung (bantuan modal, hibah bahan baku) dan intervensi struktural jangka panjang, seperti:

1. Mendorong literasi keuangan agar pelaku usaha mampu mengelola modal secara efisien.
2. Mengembangkan pusat data UMKM berbasis digital agar perencanaan fiskal lebih akurat dan tepat sasaran.
3. Mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan program non-fiskal seperti pelatihan, sertifikasi halal, dan promosi digital.

Dengan demikian, arah kebijakan fiskal di Gorontalo dapat bertransformasi dari sekadar stimulus jangka pendek menjadi strategi pembangunan ekonomi mikro berkelanjutan. Melalui kebijakan fiskal yang inklusif dan berbasis data, Provinsi Gorontalo memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor mikro sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, adaptif, dan berkeadilan.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan ekonomi fiskal di Provinsi Gorontalo terbukti memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi mikro, khususnya dalam penguatan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Melalui peningkatan belanja publik, bantuan modal, dan insentif pajak, pemerintah berhasil mendorong produktivitas, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha kecil.

Program seperti e-catalog daerah dan digitalisasi pendataan UMKM turut memperkuat daya saing serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Namun, efektivitas kebijakan masih terhambat oleh rendahnya literasi keuangan dan digital, keterbatasan akses pembiayaan, serta belum optimalnya sistem pendataan UMKM.

Oleh karena itu, arah kebijakan fiskal ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas pelaku UMKM, peningkatan literasi digital, serta integrasi antara kebijakan fiskal dan program pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Dengan langkah tersebut, UMKM di Gorontalo dapat tumbuh lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai motor utama pembangunan ekonomi daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adzam, M., Etania, A. R., & Alviyani, F. A. (2024). Pentingnya Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kendali Akuntansi*. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i2.2958>
- Al\_kasasbeh, O. (2023). The Impact Of Fiscal Policy On Economic Growth. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*. <https://doi.org/10.58355/historical.v2i1.38>
- Ali, D., & Saleh, S. (2020). The Effect Of Fiscal Decentralization And Economic Growth On Poverty In Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*. <https://doi.org/10.37479/jej.v1i2.4381>
- Aprilia, N., Subroto, W., & Sakti, N. (2025). The Role of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Supporting the People's Economy in Indonesia. *International Journal of Research and Scientific Innovation*. <https://doi.org/10.51244/ijrsi.2024.11120036>
- Atichasari, A., & Marfu, A. (2023). The Influence of Tax Policies on Investment Decisions and Business Development of Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) and its Implications for Economic Growth in Indonesia. *JOURNAL OF ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT STUDIES*. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i7-32>
- Dama, H. (2024). The Impact of the Implementation of the Government's Digital Direct Expenditure Program to Improve MSME Performance. *International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Education*. <https://doi.org/10.58806/ijirme.2024.v3i4n23>
- Dewi, N. G., Ridhasyah, R., & Wibawa, T. A. (2023). Financial Access and MSMEs Performance during Pandemic COVID-19: The Moderating Role of Digitization. *Journal of Developing Economies*. <https://doi.org/10.20473/jde.v8i1.36843>

- Factors Determining the Policy Implementation for Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMES) Empowerment In Indonesia. (2022). In Central European Management Journal. <https://doi.org/10.57030/23364890.cemj.30.4.31>
- Hadi, D. P., Adi, P., Arintoko, & Ahmad, A. (2023). The Impact of the Omnibus Law Cipta Kerja on the Sustainability of MSMEs and Economic Growth by Applying the Canvas Model Business Method and the Use of Financial Technology, Especially Crowdfunding and Microfinance. *International Journal of Sustainable Development and Planning*. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180219>
- Humalangi, M., Lantapon, N., Butolo, I., & Saksono, H. (2023). Strategic-Competitiveness for Socio-Economic Development: Unlocking the Potential of Gorontalo Province in the Context of the Nusantara Capital Integrated Development (IKN). *Jurnal Bina Praja*. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.639-649>
- Juminawati, S., Hamid, A., Amalia, E., Mufraini, M., & Mulazid, A. S. (2021). The Effect of Micro, Small and Medium Enterprises on Economic Growth. 4, 5697-5704. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2368>
- Lastri, L., Purba, E., Sihotang, J., & Gea, P. A. (2025). Analysis Of The Impact Of Macroeconomic Policies On Economic Growth In Indonesia (2010-2022). *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v12i03.7894>
- Nayak, M. K., & Soni, S. (2023). ROLE OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN THE DEVELOPMENT OF CHHATTISGARH. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.5160>
- Pasichnyi, M. (2020). Fiscal policy and economic development. *University Economic Bulletin*. <https://doi.org/10.31470/2306-546x-2020-44-153-164>
- Prasetyo, P. (2020). The Role of Government Expenditure and Investment for MSME Growth: Empirical Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7, 471-480. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.471>
- Sahi, D. F., Arham, M. A., & Santoso, I. (2020). The Impact of Government Infrastructure Spending on Economic Growth and Poverty in Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*. <https://doi.org/10.37479/jej.v2i1.4494>
- Sinha, K. J., Sinha, S., & Sinha, B. J. (2024). Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs): The Significant Role and Challenges in Indonesia's Economy. *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.20824>
- Sitompul, M. D. P., Lubis, S. N., & Rahmanta. (2023). The Effect of Government Policies on the Success of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Regional Development in North Tapanuli Regency. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2023/v20i4754>
- Tendengu, S., Kapingura, F., & Tsegaye, A. (2022). Fiscal Policy and Economic Growth in South Africa. *Economies*. <https://doi.org/10.3390/economies10090204>
- Weldeslassie, H. A., Vermaack, C., Gebrekirstos, K., Minwuyelet, L., Tsegay, M., Tekola, N. H., & Gidey, Y. (2019). Contributions of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to Income Generation, Employment and GDP: Case Study Ethiopia. *Journal of Sustainable Development*. <https://doi.org/10.5539/jsd.v12n3p46>